

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki abad ke-20 terjadi perubahan struktur peranan wanita Indonesia ide atau pemikiran dari barat masuk bersamaan dengan diperkenalkan dan disebarluaskan pendidikan cara barat dalam kaitannya dengan politik etika yang dijalankan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kaum wanita walaupun jumlahnya masih terbatas, mulai ada yang berkesempatan menikmati pendidikan barat itu. Karena itu, muncullah orang-orang yang mulai sadar akan diri pribadi dan statusnya. Mereka tumbuh kesadarannya bahwa mereka hidup di bawah kaum penjajah dengan praktek-praktek kolonialnya R.A. Kartini, Dewi Sartika, Rohana Kudus, Rahmah el yunussiyah, Nyai Ahmad Dahlan, Haji Rasuna dan Maria Walanda Maramis merupakan nama-nama tokoh wanita dari kalangan kaum elit modern Indonesia dari pendidikan dan pengetahuan yang mereka peroleh. Mereka menyadari akan keadaan kaumnya. Oleh karena itu, dengan berbagai cara mereka berusaha untuk menyadarkan kaum wanita akan kedudukan dan partisipasinya dalam masyarakat.

Memasuki abad 21 partisipasi wanita semakin meningkat yang menarik adalah bahwa peluang bagi wanita untuk menjadi pemimpin semakin besar. Dari fakta-fakta sejarah kita peroleh gambaran yang menarik perhatian yang berhubungan dengan kedudukan dan peranan wanita di Indonesia. Wanita Indonesia ternyata bisa memperoleh kedudukan, wewenang dan kekuasaan

tertinggi sebagai kepala negara disamping itu, mereka juga telah berkiprah di berbagai bidang yang sering dianggap sebagai dunia laki-laki. Hal ini bertentangan dengan gambaran umum yang ada dalam masyarakat Indonesia dimana kaum wanita yang dibedakan dari kaum laki-laki mempunyai kedudukan yang rendah dan hidup terkekang. Mereka seolah-olah tidak mempunyai peluang untuk berkembang.

Gambaran semacam ini jelas terungkap dalam surat-surat R.A. Kartini.¹ Ungkapan-ungkapan umum yang menggambarkan citra wanita sebagai manusia sekunder atau nomor dua. Wanita diberi gelar Ratu dapur atau rumah tangga. Menunjukkan tempat dimana seyogyanya wanita itu berada. Wanita sebagai konco wingking (dalam ungkapan bahasa Jawa berarti teman di belakang) merupakan pihak yang harus diatur dan dilindungi. Pria sebagai kepala rumah tangga dan wanita sebagai pengatur rumah.

Dengan kesadaran dan pengetahuan baru yang diperolehnya wanita tidak hanya bisa menjadi ibu rumah tangga atau istri yang bergerak di wilayah domestik potensi yang dipunyai wanita justru harus dikembangkan kesempatan memasuki dunia laki-laki atau wilayah publik yang berada di luar rumah mulai terbuka dan semakin lama semakin lebar. Sudah tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dengan syarat-syarat yang dikenakan pada kaum laki-laki.

Sebenarnya wanita dan laki-laki pada dasarnya sama cerdas otaknya sama mulia budinya, sama luhur cita-citanya. Mereka sama-sama memiliki impian dan

¹ Sulastin Sutrisno, Surat-surat Kartini, *Remngan Tentang dan untuk Bangsaanya*, Djambatan Jakarta, 1981, hal. 51.

harapan mereka juga sama-sama didera oleh kekhawatiran sama-sama memiliki potensi untuk berpartisipasi dalam politik.²

Dalam GBHN mengenai partisipasi wanita dalam pembangunan bangsa termaktub bahwa wanita, baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber daya insani pembangunan, mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria dalam pembangunan di segala bidang. Wanita diakui sebagai mitra sejajar pria. Jadi sebetulnya tidak ada masalah bagi wanita Indonesia untuk mengembangkan potensinya sepenuhnya.

Di dalam butir tentang “partisipasi wanita dalam pembangunan bangsa” GBHN menggariskan, antara lain:

“Wanita..., mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria dalam pembangunan di segala bidang pembinaan peranan wanita sebagai mitra sejajar pria ditujukan untuk meningkatkan peran aktif dalam kegiatan pembangunan”

Ketertarikan penulis memilih Kelurahan kunduran sebagai lokasi penelitian dikarenakan, pada pemilihan umum legislative tahun 2004 di Kelurahan Kunduran terdapat tiga orang calon anggota legislative perempuan, namun tidak satupun dari mereka terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis terlihat bahwa mayoritas perempuan di Kelurahan Kunduran bekerja disektor public seperti menjadi pedagang, Guru atau pegawai negeri sipil, namun mereka enggan masuk dalam

² Melly G. Tan. *Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan*. Pusaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991. Hal 13

dunia politik, seperti masuk dalam partai politik, dan menjadi calon anggota legislative.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan penulis dalam latar belakang masalah maka permasalahan yang akan penulis jawab adalah “bagaimana persepsi masyarakat Kelurahan Kunduran Kabupaten Blora Tentang Partisipasi perempuan di dalam Politik?”

C. Manfaat dan Tujuan Penelitian

1. Manfaat penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini memberikan informasi tentang tingkat partisipasi perempuan di dalam politik di Kelurahan Kunduran Kabupaten Blora Jawa Tengah.
- b. Memberikan sumbangan teoritis mengenai partisipasi perempuan di dalam politik.
- c. Hasil penelitian diharapkan pula dapat memeberikan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mendalami dan melakukan penelitian serupa di tempat lain.

2. Tujuan penelitian ini adalah :

Berdasarkan perumusan diatas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap partisipasi perempuan di dalam politik.

D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan uraian yang menjelaskan variabel dan hubungan-hubungan antar variabel berdasarkan konsep tertentu dan kerangka dasar teori dalam penelitian ini adalah:

1. Persepsi

Dalam kenyataannya, sikap seseorang dipengaruhi oleh persepsinya. Persepsi merupakan suatu faktor penentu yang terjadi dalam diri seseorang yang akan mempengaruhi dirinya dalam mengambil suatu keputusan atau melakukan suatu tindakan atau perilaku tertentu, oleh sebab itu persepsi merupakan hasil dari suatu penelitian terhadap obyek tertentu. Manusia dalam hal ini sebagai perseptor dalam suatu proses persepsi secara runtut melihat obyek sasaran, kejadian atau hubungan antara keduanya, mendengar menyetujui (kalau objek fisik), merasakan atau memahami suatu obyek atau sasaran dan akhirnya dapat menilai sesuatu berdasarkan atas suatu pengalaman yang dialaminya.

Menurut Saparinah Sadli batasan persepsi sebagai berikut:³

“Persepsi seseorang merupakan suatu proses yang aktif dimana memegang peranan bukan hanya stimulaasi yang mengenalnya, tetapi juga ia sebagai keseluruhan dengan pengalaman-pengalamannya, motivasi dan sikap yang relevan terhadap stimulus tersebut”.

Sedangkan menurut Bimo Walgito, batasan persepsi yaitu:⁴

“Persepsi merupakan proses pengorganisasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integral dalam diri individu”.

³ Saparinah Sadli *“Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Penyimpangan”* LP3ES, Jakarta. 1989.

⁴ Walgito Bimo, *Psikologi Sebagai Pengantar*, Yogyakarta, Andi Offset. 1991.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah merupakan proses mental individu di dalam memberikan pandangannya terhadap suatu hal atau obyek sehingga menghasilkan sikap tertentu dalam diri individu yang bersangkutan, karena sikap individu akan memberikan arti tertentu pada lingkungan tertentu pula, maka individu yang berbeda akan melihat hal yang sama dengan cara yang berbeda. Dengan kata lain persepsi merupakan bentuk pola pikir seseorang dalam memahami suatu fenomena/obyek tertentu.

Bentuk persepsi seseorang akan sangat menentukan bagaimana seseorang itu bersikap berkenalan dengan obyek tertentu yang tidak lepas dari kondisi suatu lingkungannya. Namun suatu ketika lingkungannya diciptakan sesuai dengan persepsi yang dimiliki seseorang sebagai sebuah pandangan terhadap suatu hal, maka sistem nilai yang dianut masyarakat lingkungannya sangat berpengaruh terhadap pembentukan seseorang.

Adalah jelas bahwa agar terjadi persepsi harus ada hal-hal yang tercakup dalam proses persepsi itu sendiri. Syarat-syarat yang harus tercakup dalam proses persepsi itu sendiri:

- a. Obyek atau sasaran yang diamati
- b. Alat indera yang cukup baik untuk menangkap obyek
- c. Perhatian yang dalam hal ini merupakan persiapan dalam mengadakan pengamatan

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa persepsi merupakan aktivitas penilaian seseorang terhadap suatu obyek fisik maupun sosial, yang

berdasarkan faktor-faktor subyektif (pengalaman dan pengetahuannya). Oleh karenanya, maka pengukuran konsep ini adalah dengan melihat penilaian dan pendapat seseorang terhadap suatu obyek yang dalam hal ini penilaian terhadap persepsi masyarakat Kelurahan Kunduran Kabupaten Blora tentang Perempuan di dalam politik.

2. Masyarakat

2.1. Definisi Masyarakat

a. Definisi Masyarakat Secara Umum

Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain.⁵

b. Definisi Masyarakat menurut Pandangan Biologis

Pengikut pelajaran sosiologi organis (yaitu pelajaran sosiologi yang memandang masyarakat ini sebagai suatu badan yang hidup, tak berbeda dari pada hewan dan manusia yang juga disebut sosiologi biologis) dalam khususnya mempersamakan masyarakat dengan suatu organisme itu melihat masyarakat sebagai suatu barang yang hidup, yang mempunyai jantung (pemerintah) beranggota dan berurat saraf (telegram dan telepon) dan sebagainya.

2.2. Masyarakat dan Macamnya

Masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses masyarakat yang menyebabkan perubahan itu. dalam zaman biasa masyarakat mengenal kehidupan yang teratur dan aman,

⁵ Hassan Shadily. 1993. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta Hal. 47

disebabkan oleh karena pengorbanan sebagian kemerdekaan dari anggota-anggota, baik dengan paksa maupun sukarela. Pengorbanan disini dimaksud menahan nafsu atau kehendak sewenang-wenang, untuk mengutamakan kepentingan dan keamanan bersama. Dengan paksa berarti tunduk kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan (negara, perkumpulan dan sebagainya) dengan sukarela berada menurut adat dan berdasarkan kinsyafan akan persaudaran dalam kehidupan bersama itu (desa berdasarkan adat dan sebagainya).

Cara terbentuknya masyarakat mendatangkan pembagian:

1. Masyarakat paksaan, umpamanya negara, masyarakat tawanan, masyarakat pengungsi atau pelarian dan sebagainya. Ke dalam kelompoknya bersifat *gemeinschaft* ke luar bersifat *Gesellschaft*
2. Masyarakat merdeka yang terbagi pula dalam:
 - a. Masyarakat alam yaitu yang terjadi dengan sendirinya, suku golongan atau suku, yang bertalian karena daerah atau keturunan, umumnya yang masih sederhana sekali kebudayaannya dalam keadaan terpencil atau tak mudah berhubungan dengan dunia lain. umumnya bersifat *Gemeinschaft*.
 - b. Masyarakat budidaya, terdiri karena kepentingan keduniaan atau kepercayaan (keagamaan), yaitu antara lain kongsi perekonomian, koperasi, geraja dan sebagainya.

2.3. Asal Mula Masyarakat

bermacam-macam penyelidikan dijalankan, untuk mendapat jawaban tentang asal masyarakat, tetapi tiada satupun yang dapat ditegaskan benar,

semua pendapat hanya merupakan kira-kira dan pandangan saja. Antara lain orang berkesimpulan, bahwa manusia ini tidak dapat hidup seorang diri, hidup dalam gua atau di pulau sunyi umpamanya. Selalu ia akan tertari kepada hidup bersama dalam masyarakat, karena:

- a. Hasrat yang berdasra naluri (kehendak biologis yang diluar penguasaan akal) untuk mencari teman hidup, pertama untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sifatnya bioilogis sebagai terdapat pada semua makhluk hidup. Baik pria maupun wania tertarik satu sama lain. nafsu biologis timbul sejak mulai manusia menginjak umur remaja sampai dewasa bahkan sampai umur tua pada lelaki. Pada kaum rupanya nafsu ini lebih cepat dipadamkan atau diatur pengendaliannya apalagi bilamana ia telah mempunyai 3-4 anak dan berumur sekitar 5-50 tahun.
- b. Kelemahan manusia selalu mendesak untuk mencari kekuatan bersama yang terdapat berserikat dengan orang lain, sehingga dapat berlindung bersama-sama dan dapat memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dengan usaha bersama

Sejak lahirnya sebagai bayi manusia telah tampak dalam kelemahannya. Kebutuhan untuk perlindungan sebagai yang diterima dari ibu bapak selalu diharapkan. Demikian pula yang diharapkan perlindungan keluarga itu sendiri terhadap bahaya yang mengancam dari luar.

Demikian keluarga terbentuk dan selanjutnya suku bangsa, bangsa dan sebagainya.

- c. Aristoteles berpendapat, bahwa manusia itu adalah *zoon politicon* yaitu makhluk sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan, atau sedikitnya mencari teman untuk hidup bersama, lebih suka dari pada hidup sendiri.
- d. Lain dari pada Aristoteles maka *Bergson (lahir 1859) berpendapat, bahwa manusia ini hidup bersama bukan karena persamaan, melainkan oleh karena perbedaan terdapat dalam sifat, kedudukan dan sebagainya. Pendapat ini berdasar pelajaran dialektika, yang mencoba melihat kebenaran dalam kenyataannya dengan mengadakan perbedaan. Menurut Bergson kenyataan hidup baru terasa dengan perbedaan antara manusia masing-masing itu dalam kehidupan bergolongan. Pendapat Aristoteles yang telah kuno itu tidak bertentangan dengan pendapat Bergson yang bersifat modern, keduanya dapat dikui kebenaran dasar pemikirannya, kalau kita mengetahui bahwa golongan sosial ini bergerak atau proses asosiasi, integrasi dan diferensiasi atau dengan singkatnya atas proses mengikat dan memisah.

3. Partisipasi Politik

3.1. Pengertian Partisipasi Politik

Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif

dalam kehidupan politik, yaitu dengan cara jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberi suara dalam pemilihan umum, menjadi anggota suatu partai politik atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan *contacting* kelompok kepentingan dengan pejabat atau anggota parlemen dan sebagainya.

Di bawah ini disajikan pengertian partisipasi politik yang lain yang dikemukakan oleh beberapa sarjana:

Herbert Mc Closki dalam *Internasional Encyclopedia of the Social Sciences*:

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung dan tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.⁶

Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam *Handbook of political science*:

Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Yang diteropong terutama adalah “tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah”, sekalipun fokus sebenarnya lebih luas tetapi abstrak, yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi “alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat”⁷

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice*:

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. partisipasi bisa bersifat

⁶ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan partai Politik Sebuah Bunga Rampai*. PT Gramedia, Jakarta, hal. 1.

⁷ Norman H. Nie dan Sidney Verba, dalam Miriam Budiardjo, *Ibid*, hal 1-2

individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal, atau ilegal, efektif atau tidak efektif.⁸

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan dalam pengertian partisipasi ini menunjukkan adanya unsur-unsur aktivitas dimana perbuatan dari seseorang untuk ikut serta ambil bagian dalam suatu kegiatan organisasi. Dengan membangkitkan dan menumbuhkan perasaan orang lain akan menimbulkan keinginan orang itu untuk mengambil bagian dalam suatu kegiatan organisasi baik secara fisik maupun non fisik, terorganisir maupun tidak terorganisir, legal maupun tidak legal untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

3.2. Jenis-jenis Partisipasi

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam bukunya *No Easy Choice* memilih partisipasi politik tersebut dalam dua kategori, yakni partisipasi yang bersifat otonom (*Autonom Participation*) dan partisipasi yang bermobilisasi atau dikenakan oleh pihak lain (*Mobilized Participation*)⁹

1) Partisipasi Otonom

Dalam hal ini partisipasi yang dilaksanakan benar-benar muncul atas kesadaran sendiri tanpa ada pengaruh dari luar, sebagai akibat dari adanya kesadaran individual, kesadaran individual tersebut merupakan pengaruh atau akibat dari beberapa faktor antara lain *pertama*, tingkat pendidikan yang dilampauinya pendidikan disini

⁸ Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, dalam Miriam Budiardjo, *Ibid*, hal.2

⁹ Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, dalam *No Easy Choice*, *op.cit*, hal. 3.

dapat diartikan sebagai pendidikan yang bersifat formal (sekolah, kuliah, dll). Dengan tingkat pendidikan yang memadai dan pengetahuan yang semakin tinggi maka kesadaran akan partisipasi politik akan semakin tinggi *kedua*, tingkat ekonomi masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang menengah ke atas maka warga masyarakat mempunyai waktu yang lebih banyak untuk memikirkan permasalahan politik, demikian juga sebaliknya dengan kondisi perekonomian yang minim, kesempatan untuk ikut dalam proses politikpun semakin sedikit pula, *ketiga*, tingkat dependensi atau ketergantungan masyarakat terhadap pemerintahan, semakin kecil tingkat ketergantungan pada pemerintah maka partisipasi akan bersifat otonom.

2) Partisipasi yang dimobilisasi

Merupakan jenis partisipasi yang dilakukan dengan cara pengerahan massa oleh orang-orang atau kelompok ataupun oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan politik tertentu keadaan seperti ini biasanya diakibatkan oleh beberapa faktor berikut. Antara lain, pertama, mereka adalah orang yang berpendidikan rendah atau bahkan tidak berpendidikan rendah sama sekali, kedua, mereka berasal dari masyarakat golongan miskin atau mempunyai ekonomi menengah ke bawah, ketiga, sifat ketergantungan terhadap pemerintah terlalu tinggi dan keempat, ada tekanan maupun manipulasi dari pihak lain. Dari uraian di atas sangat jelas telah

diterangkan bahwa adanya atau tingkat tinggi rendahnya partisipasi warga negara dalam politik dipengaruhi oleh banyak hal baik oleh tingkat pendidikan, tingkat pendapatan ataupun tingkat kesadaran individu-individu itu sendiri dan partisipasi politik dapat bersifat individu maupun kelompok, partisipasi dapat tumbuh atau muncul dari dalam diri individu itu sendiri maupun digerakkan oleh pihak lain.

3.3 Cara-cara Berpartisipasi

Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai macam-macam bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan perbedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Menurut pengamatan, jumlah orang yang mengikuti kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, besar sekali. Pejabat partai sepenuh waktu, pemimpin partai atau kelompok kepentingan. Petugas kampanye anggota aktif dari partai atau kelompok kepentingan aktif dalam proyek-proyek sosial.

Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis politik ini mencakup antara lain, menjadi pimpinan partai politik atau menjadi anggota partai politik dan bergabung dalam kelompok-kelompok kepentingan.

Ada yang menyamakan dua jenis gejala ini dengan piramida yang basisnya lebar, tetapi menyempit ke atas sejalan dengan meningkatnya intensitas kegiatan politik. Diantara basis dan puncak terdapat berbagai kegiatan yang berbeda-beda intensitasnya. Berbeda menurut intensitas kegiatan maupun mengenai bobot komitmen dari orang yang bersangkutan, termasuk didalamnya dari (mulai kegiatan yang kurang intensif); memberi suara dalam pemilihan umum, membaca secara teratur berita politik dalam surat kabar, menghadiri rapat-rapat yang bersifat politik, menjadi anggota kelompok kepentingan atau menjadi anggota partai politik, melibatkan diri dalam berbagai proyek pekerjaan sosial, *contacting* pejabat-pejabat dan bekerja aktif sebagai anggota kelompok kepentingan atau partai politik, yang lebih intensif lagi adalah melibatkan diri dalam kampanye pemilihan, dan yang paling intensif, sebagai pimpinan partai politik atau pimpinan kelompok kepentingan.

3.4. Bentuk-bentuk partisipasi politik

Secara teoritis partisipasi politik adalah dua bentuk yaitu:

1. Bentuk konvensional yang merupakan bentuk partisipasi politik yang normal sah atau lazim dalam demokrasi modern
2. Bentuk non-konvensional termasuk beberapa yang mungkin legal (seperti petisi) maupun ilegal, penuh kekerasan, dan revolusioner.¹⁰

Adapun kegiatan-kegiatan yang tergolong dalam bentuk kedua

¹⁰ Mochtar Mas' oed dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University: Jogjakarta, 1993, Hal 146.

partisipasi politik di atas secara lebih lengkapnya adalah dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Cara-cara Berpartisipasi

Konvensional	Non konvensional
Pemberian tugas (<i>voting</i>)	Pengajuan petisi
Diskusi politik	Demonstrasi
Kegiatan kampanye	Konfontrasi
Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan	Mogok
Komunikasi individu dengan pejabat politik dan administrative	Tindakan kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pengeboman, pembakaran)
	Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan)
	Perang gerilya dan revolusi

Sumber: Mohtar Mas'oeed dan Colin Mas Andrews, Perbandingan sistem Politik, Gadjah Mada University, Yogyakarta 1993, hal.47

4. Partisipasi Politik Perempuan

Apabila melihat dari sejarah pergerakan wanita Indonesia dalam bidang politik, ternyata wanita Indonesia cukup tinggi keterlibatannya dalam bidang ini. Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan wanita dalam melawan penjajahan bangsa asing kemudian berusaha merebut kemerdekaan serta menghadapi gejolak politik yang terjadi di dalam negeri.

Pada masa sekarang ini, keikutsertaan kaum wanita dalam kegiatan politik memang sangat diperlukan untuk menunjang program pembangunan. Sebagai tenaga potensial, kaum wanita yang jumlahnya lebih banyak dari kaum laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Hardjito Notopuro dalam bukunya peranan wanita dalam

masa pembangunan, menegaskan persamaan politik kaum perempuan dan kaum laki-laki serta keikutsertaan wanita dalam kegiatan politik.

Didalam kenyataan dewasa ini gerakan wanita Indonesia telah mencapai banyak kemajuan. Semenjak di proklamasikannya Republik Indonesia, disamping tokoh pemimpin pria, tokoh-tokoh wanitapun banyak bermunculan dan memainkan peranannya yang aktif di segala sector pemerintahan. Demikian yang terjun dalam gelanggang politik bertambah banyak. Dalam alam kemerdekaan ini, persamaan hak antara pria dan wanita betul-betul tidak ada perbedaan. Dalam perkembangan kehidupan Negara, wanita tidak dibedakan dengan pria dalam melaksanakan hak politiknya untuk dipilih dan memilih anggota (calon) Badan perwakilan dan memang tidak sedikit kaum wanita yang berperan dalam badan perwakilan sebagai anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.¹¹

Kaum wanita dalam kedudukannya sebagai warga Negara memang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kaum pria untuk ikutserta melibatkan diri dalam kegiatan politik, seperti ikut serta dalam pemilihan umum, menjadi anggota organisasi wanita, menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat ataupun kegiatan politik lainnya. Namun demikian keikutsertaan wanita dalam kegiatan politik haruslah sesuai dengan kodratnya.

5. Factor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik Perempuan

Sebagaimana yang dikemukakan Miriam Budiarto, bahwa:

“Pendapatan (income), pendidikan dan status merupakan factor penting dalam proses partisipasi atau dengan perkataan lain, orang yang pendapatannya tinggi, yang berpendidikan baik dan berstatus social tinggi,

¹¹ Hardjito Notopurono, “Peranan Wanita Dalam Masa Pembangunan” Jakarta: Ghalia, 1974 hal 87

cenderung untuk lebih banyak berpartisipasi daripada orang yang berpendapatan serta berpendidikan rendah".¹²

Selanjutnya Maswadi Rauf dalam jurnal Ilmu Politik mengutarakan bahwa dalam pandangan para ilmuwan barat, tingkat status social ekonomi yang tinggi (pendidikan, pekerjaan dan penghasilan) menjadi persyaratan bagi terciptanya tingkat partisipasi yang tinggi. Pandangan diatas didasarkan atas alur pemikiran bahwa :

Mereka yang berpendidikan tinggi memiliki pengetahuan dan informasi lebih baik dibandingkan mereka yang berpendidikan lebih rendah atau tidak sekolah. Dengan modal tersebut, mereka yang berpendidikan tinggi lebih memahami makna kehidupan politik sehingga lebih cenderung terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik. Pekerjaan yang lebih baik yang dimiliki seseorang mencerminkan kemampuan orang tersebut, terutama dalam tingkat intelektual dan kemampuan pribadi lainnya. Dalam hal penghasilan yang tinggi memberikan keleluasaan bagi orang tersebut untuk aktif di berbagai aspek kehidupan social termasuk politik.¹³

Dari pernyataan para ahli di atas, kita dapat melihat bahwa pekerjaan, pendidikan dan pendapatan merupakan hal yang dapat mempengaruhi partisipasi politik seseorang. Apabila pendidikan seseorang itu lebih baik dan mempunyai status social yang tinggi, maka ia akan cenderung lebih banyak berpartisipasi politik daripada orang yang berpendapatan dan berpendidikan rendah. Dengan adanya tingkat status social ekonominya (pendidikan,

¹²Miriam Budiarto, "*Partisipasi dan Partai Politik*", Jakarta : Gramedia, 1982, hal 8

¹³Maswadi Rauf, "*Jurnal Ilmu Politik*", Jakarta ; Gramedia, 1991, hal 7-10

pekerjaan dan penghasilan) yang tinggi, akan menimbulkan pengetahuan dan kesadaran politik, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan partisipasi politik. Jadi jelaslah disini bahwa pendidikan, pekerjaan dan pendapatan merupakan factor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi politik perempuan.

6. Perempuan dan Politik

Perempuan dan politik merupakan dua hal yang masih sulit di bayangkan, terutama pada negara-negara berkembang. Hal ini disebabkan manusia telah dibentuk oleh budayanya masing-masing yang menekankan bahwa kedudukan atau peranan perempuan berkisar dalam lingkungan keluarga seperti mengurus suami, anak-anak, memasak dan lain sebagainya. Sedangkan politik digambarkan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan "power" atau kekuasaan, dari sejak dahulu bidang yang selalu dikaitkan dengan bidang laki-laki dan seakan "tabu" di masuki oleh perempuan. Sosialisasi dalam keluarga, baik di masyarakat barat maupun timur selama berabad-abad telah menempatkan perempuan diluar masalah-masalah yang berkaitan dengan politik dan kekuasaan.

Kedudukan perempuan yang demikian ternyata tidak dapat dipertahankan, karena dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan yang meletakkan perempuan untuk terus-menerus tersubordinat dalam bidang social, ekonomi dan politik tidak dapat dipertahankan lagi. Sedikit demi sedikit bermula dari dunia barat, perempuan dapat menaikkan posisinya dari subordinate di berbagai bidang termasuk politik. Memang kita harus

mengakui bahwa masih terdapat hambatan yang besar untuk menembus pandangan bahwa politik adalah hanya untuk laki-laki saja. Tetapi kini masyarakat mulai menyadari bahwa, baik di barat maupun di timur perempuanpun dapat terjun dan terlibat dalam politik asal di beri kesempatan. Perempuan di seluruh dunia pada setiap tingkat sosio-politik merasa dirinya kurang terwakili dalam politik dan jauh dari ketelibatan dalam pembuatan keputusan. Sementara antara politik di setiap Negara mempunyai karakter khusus tersendiri, tetapi ada sebuah gambaran umum yang tetap bagi semua: ada keseimbangan dan tidak kondusif terhadap partisipasi perempuan. Perempuan yang ingin masuk dalam dunia politik, public, budaya dan social, sering tidak bersahabat atau bahkan bermusuhan dengannya. Bahkan secara sepihak komposisi pembuat keputusan politik sekarang di berbagai wilayah termasuk Indonesia memberikan bukti bahwa perempuan tetap menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan dalam berpartisipasi dalam politik adalah sebagai berikut:

1. Kelaziman “model maskulin” dalam politik.

Kehidupan politik diorganisir sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai laki-laki. Lingkungan ini berbeda dengan perempuan, baik karena hakikatnya maupun pengalamannya keberadaan dari model yang didominasi laki-laki ini menghasilkan apakah perempuan menolak politik secara keseluruhan atau menolak politik bergaya laki-laki. Jadi, ketika perempuan berpartisipasi dalam politik mereka cenderung melakukannya dalam jumlah kecil.

2. Kurangnya dukungan partai politik

Perempuan memainkan peran penting dalam kampanye dan memobilisasi dukungan bagi partainya, meskipun mereka jarang mengambil keputusan di dalam partainya. Kenyataannya kurang dari 11 persen dari pemimpin partai berkelas dunia adalah perempuan.

3. Kurangnya hubungan dan kerjasama dengan organisasi perempuan

Selama dekade terakhir, ada peningkatan wakil perempuan di dalam parlemen dalam kehidupan demokrasi yang sedang berlangsung salah satu alasan kritis dari peningkatan ini adalah akibat pengaruh dari organisasi perempuan, baik di dalam maupun di luar partai-partai politik, organisasi-organisasi perempuan sangat menyadari pengaruh pemilihan proporsional terbuka terhadap kandidat perempuan.

Namun belakangan ini, dalam demokrasi yang berkembang secara parsial atau yang sudah terbatas politisi perempuan dan organisasi perempuan. Lebih jauh lagi gerakan-gerakan perempuan dan kelompok-kelompok perempuan dalam hal ini cenderung menjaga jarak dari perempuan anggota parlemen, atau tidak organisir dalam bentuk komunikasi dan lobi mengenai berbagai isu yang terkait untuk meningkatkan perempuan pada tingkat pembuat keputusan.

Jadi untuk memperkuat dan memungkinkan perempuan berpartisipasi dalam politik, penting untuk memperluas lingkup keterlibatan perempuan pada tingkat akar rumput (*grass roots*) dari gerakan perempuan

4. Tiadanya sistem pelatihan dan pendidikan yang berkembang, baik kepemimpinan perempuan pada umumnya, maupun bagi orientasi perempuan muda pada kehidupan politik khususnya.

Sangat sulit bagi perempuan untuk bicara, untuk berdebat, untuk menekankan kepentingannya. Bagaimana kami dapat mendorong perempuan untuk berbicara dan mengekspresikan dirinya? Mungkin perempuan di dalam benaknya (in the hut) mempunyai banyak hal untuk dikatakan, tetapi kami harus mendorongnya untuk berbicara-bicara tentang politik, tetapi masalahnya, kehidupannya, isu-isu yang menjadi perhatiannya. Jawabannya adalah pendidikan. Pendidikan telah mengarahkan perempuan dalam masyarakatnya untuk bergabungnya dengan partai-partai politik atau berpartisipasi dalam aktivitas politik. Pendidikan adalah saluran paling penting untuk mendorong perempuan berbicara.

Rawya Shawa, Anggota Parlemen Palestina

Mengembangkan jajak pendapat tentang perempuan yang memenuhi syarat untuk direkrut dalam karier politik juga diperlukan. Ini dapat dilakukan dengan memberikan akses perempuan, dari suatu tahap awal untuk melakukan pola-pola kondusif mengenai kepemimpinan politik, seperti pelatihan khusus yang didasarkan pada komunitas atau organisasi-organisasi RT/ RW. Pemahaman umum tentang keprihatinan atau urusan perempuan, munculnya kesadaran politik berbasis gender, keahlian lobi, dan jaringan kerja adalah penting di dalam proses pelatihan perempuan untuk karier politik. Yang terakhir, pemikiran kepemimpinan perempuan memainkan peran khusus, karena hal ini adalah tempat dimana dapat dilakukan kaitan antara kelompok-kelompok yang lebih luas dengan para politisi perempuan dan juga merupakan satu-satunya tempat dimana perempuan dapat

mempersiapkan dan mendorong karir politiknya dalam parlemen. Perhatian khusus diberikan juga kepada keterlibatan perempuan muda dalam partisipasi politik.

5. Beban ganda mengenai tugas-tugas rumah tangga profesional

Dibanyak negara, perempuan membawa suatu ketidakseimbangan pembagian kerja rumah tangga. Partisipasi perempuan dalam politik selanjutnya di batasi oleh kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan akses informasi. Harus diakui bahwa adalah sulit bagi perempuan berpartisipasi dalam kehidupan politik ketika perhatian utamanya adalah kelangsungan hidup dan mereka tidak mempunyai pilihan kecuali untuk meluangkan lebih banyak waktunya mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya.

6. Pola-pola kultural maupun peran sosial yang ditetapkan sebelum diberikan kepada perempuan dan laki-laki.

Di banyak negara, tradisi tetap berlaku untuk menekan, dan sering mendikte, peran utama perempuan sebagai ibu dan istri. Sistem nilai patriaki, kaku, tradisional menampilkan peran-peran yang tersegregasi secara seksual, dan ini disebut sebagai nilai-nilai kultural tradisional yang menghalangi terhadap kemajuan, perkembangan dan partisipasi perempuan dalam berbagai proses politik. Masyarakat di seluruh dunia didominasi oleh suatu ideologi tentang kedudukan perempuan. Menurut persepsi ini, perempuan tidak harus memainkan peran “ibu yang bekerja”, yang secara umum diupah rendah dan apolitis. Di samping itu

di beberapa negara berkembang, laki-laki bahkan mengajarkan kepada perempuan bagaimana cara memilih.

Di negara Indonesia terutama kebudayaan Jawa perempuan sering diberi gelar "*Ratu Dapur*" atau rumah tangga menunjukkan tempat dimana wanita itu berada. Perempuan sebagai "*konco wingking*" (dalam ungkapan bahasa Indonesia berarti teman di belakang) merupakan pihak yang harus diatur dan harus dilindungi. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai pengatur rumah tangga.

7. Kurangnya kepercayaan diri perempuan untuk berpartisipasi dalam politik

Kurangnya kepercayaan dalam diri mereka adalah salah satu alasan utama bagi tidak terwakilinya perempuan dalam lembaga-lembaga politik formal, termasuk parlemen, pemerintahan, dan partai-partai politik. Dengan kepercayaan dan kepastian, perempuan dapat meraih derajat tertinggi dalam proses politik. Untuk itulah mengapa perempuan harus percaya diri dan harus membuang jauh persepsi yang berkembang luas bahwa laki-laki harus menjadi pemimpinnya. Perempuan setara dan mempunyai potensi yang sama seperti laki-laki, tetapi hanya bagi mereka yang dapat mempertahankan hak-haknya. Perempuan sangat bagus sebagai juru kampanye, pengorganisir dan pendukung mobilisasi, tetapi mereka jarang memperebutkan posisi dalam parlemen. Suatu

“budaya ketakutan” (*culture of fear*) mencegah perempuan berkompetisi dalam pemilihan dan berpartisipasi dalam kehidupan politik¹⁴

E. Definisi Konsepsional

1. Persepsi adalah bentuk pola pikir seseorang dalam memahami sesuatu fenomena atau objek tertentu yang sangat subjektif. Dan merupakan suatu proses yang aktif dimana memegang peranan bukan hanya stimulus yang mengenalinya, tetapi itu sebagai keseluruhan dengan pengalaman-pengalamannya, motivasi dan sikap yang relevan terhadap stimulus tersebut.
2. Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain
3. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta aktif dalam aktivitas politik.
4. Partisipasi politik perempuan adalah serangkaian kegiatan perempuan dalam politik, seperti ikutserta dalam pemilihan umum, menjadi anggota organisasi wanita, menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat ataupun kegiatan politik lainnya.

F. Definisi Operasional

Ada dua unsure yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variable. Dengan kata lain, definisi operasional adalah semacam petunjuk

¹⁴ Karam Azza dkk. *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah Bukan Sekedar Hiasan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. 1999. hal. 20-31.

pelaksana bagaimana caranya mengukur suatu variable penelitian. Dengan demikian agar suatu penelitian dapat diukur variabelnya, maka perlu dioperasionalkan terlebih dahulu.

Definisi operasional yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pemahaman tentang politik

Politik digambarkan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan “power” atau kekuasaan dari sejak dahulu yang selalu dikaitkan dengan bidang laki-laki dan seakan “tabu” dimasuki perempuan.

2. Pemahaman tentang perempuan dan politik

Perempuan dan politik merupakan dua hal yang masih sulit di bayangkan, karena disebabkan manusia telah dibentuk oleh budayanya masing-masing yang menekankan bahwa kedudukan atau peranan perempuan berkisar dalam lingkungan domestic seperti mengurus suami, anak-anak, dan memasak.

Sedangkan politik digambarkan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan “power” atau kekuasaan, yang dari dahulu bidang yang selalu dikaitkan dengan laki-laki dan seakan “tabu” dimasuki oleh perempuan.

3. Pemahaman tentang partisipasi politik perempuan

Serangkaian kegiatan perempuan yang berhubungan dengan politik seperti ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum, menjadi anggota organisasi perempuan, menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atupun kegiatan politik lainnya.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam politik adalah:

- a. Pendidikan
 - b. Status social
 - c. Budaya
5. Faktor yang menghambat perempuan masuk dalam politik
- a. Lemahnya perempuan memiliki akses dan berintegrasi ke dalam lembaga-lembaga politik.
 - b. Lemahnya dukungan partai, termasuk uang dan sumber-sumber lainnya untuk membiayai kampanye perempuan dan mendorong kredibilitas politik, ekonomi, sosial, dan politiknya.
 - c. Lemahnya koordinasi dan dukungan dari organisasi perempuan.
 - d. Rendahnya kepercayaan dan penghargaan diri perempuan, didukung oleh pola-pola kultural tertentu yang tidak memudahkan akses perempuan pada karir politik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survey. Penelitian survey adalah pengumpulan informasi secara sistematis dari para responden dengan maksud untuk memahami atau meramal beberapa aspek perilaku dari populasi yang diamati (Soehardi Sigit, 2000; 179). Penelitian survey harus memperhatikan (*concerned*) pada sampling, disain kuisisioner atau interviw, pengadministrasian kuisisioner dan analisis data.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kelurahan Kunduran Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora Jawa Tengah. Permasalahan yang terjadi di Kelurahan Kunduran memberikan wacana terhadap penulis bahwa di Kelurahan Kunduran pada pemilu legislative tahun 2004 ada tiga orang calon anggota legislative perempuan, namun tidak satupun dari mereka yang terpilih menjadi anggota badan legislative.

3. Populasi dan Sampel

Subyek penelitian tersebut bisa juga disebut populasi. Populasi adalah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Menurut Sutrisno Hadi, populasi adalah keseluruhan penduduk yang dimaksudkan untuk diselidiki sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diselidiki.

Untuk menentukan besarnya sampel yang akan diambil agar mendapatkan data yang representatif, menurut Ida Bagus Mantra dan Kastro ada empat faktor yang harus diperhatikan:

- a. Derajat keseragaman (*degrees of homogeneity*) dari populasi semakin seragam populasi, maka semakin kecil sampel yang akan diambil.
- b. Presisi yang dikehendaki dari penelitian. Makin tinggi tingkat presisi yang dikehendaki maka akan semakin besar sampel yang akan diambil. Jadi sampel besar cenderung memberikan pandangan yang lebih mendekati nilai sesungguhnya (*true value*).
- c. Rencana analisis

d. Tenaga, biaya, dan waktu

Dari uraian diatas bila kaitkan dengan skripsi ini, maka populasi yang diambil untuk mencapai nilai sesungguhnya adalah keseluruhan jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Kunduran Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora Jawa Tengah yang sejumlah 4769 pemilih dalam pemilu legislative tahun 2004. Sedangkan sampelnya adalah sebagian kecil dari populasi yang ada. Selanjutnya demi menjamin pemerataan populasi maka penyusun mengambil sampel yang dilakukan secara acak (sampel random sampling)

Sedangkan pengertian sampel random sampling (sampel acak sederhana) menurut Ida Bagus Mantara dan Kastro dalam Mastri Singarimbun dan Sofian Effendi menyatakan.¹⁵

Sampel acak sederhana ialah sebuah sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian atau satuan elemter dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel” maka

dengan itu akan diambil adalah, dengan menggunakan rumus

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} \quad \text{Slovin:}$$

Keterangan:

n : ukuran sampel

N : ukuran populasi

e : error yang ditoleransi (0,1)

¹⁵ M. Singarimbun dan Sofian Effendi. Metodologi Penelitian Survey. LP3ES. Jakarta 1984

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{4769}{1 + 4769(0,1)^2}$$

$$n = \frac{4769}{48,69}$$

$$n = 97,95$$

Dibulatkan menjadi 100 responden

Jadi sampel yang akan diambil 100 responden jumlah pemilih dalam pemilu legislative tahun 2004 dari sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mewakilinya. Penentuan jumlah responden yang telah ditentukan adalah untuk memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pengumpulan data dan analisis data secara kolektif. Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya dalam pengumpulan data tersebut.

4. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui wawancara terhadap pihak-pihak terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Adapun pihak-pihak ini adalah masyarakat yang dianggap relevan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui dokumentasi, buku-buku dan media massa yang berhubungan dengan penelitian yang dihadapi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk dijawab. Dalam hal ini responden adalah masyarakat Kelurahan Kunduran Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora Jawa Tengah yang menjadi sampel penelitian.
- b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui papan mopnografi, literatur, brosur-brosur yang berkaitan dengan penelitian ini yang terdapat di Kelurahan Kunduran Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora Jawa Tengah.
- c. Wawancara yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari hasil tanya jawab dengan orang yang dianggap relevan.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif yaitu data-data yang telah terkumpul akan diinterpretasikan sesuai arti kata yang disesuaikan dengan tujuan dan kepentingan penelitian.

Menurut Winarno Surachmad sifat dan bentuk penelitian kualitatif ini adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, suatu hubungan, kegiatan pandangan sikap yang menampak atau tentang proses yang sedang berlangsung, kelainan yang sedang muncul,

kecenderungan yang sedang nampak, pertentangan yang sedang meruncing dan sebagainya.¹⁶

Demikian juga dalam penelitian ini untuk menganalisa mengenai persepsi masyarakat terhadap perempuan dalam politik akan digunakan analisa kualitatif. Karena disini data yang terkumpul akan dideskripsikan dalam bentuk tabel agar mudah dibaca dan dipahami. Dan dari pemaparan tersebut dicoba untuk dianalisis dan interprestasikan sehingga diperoleh kesimpulan yang akurat.

Adapun analisis data yang lainnya menggunakan metode analisis kuantitatif yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang apa yang tercakup dalam permasalahan yang diteliti yang dilakukan yang dilakukan di lapangan pada waktu pengumpulan data.

Sedangkan untuk mengetahui persepsi masyarakat akan digunakan Interval Indeks dengan rumus:

$$\frac{(fa \times 4) + (fb \times 3) + (fc \times 2) + (fd \times 1)}{N}$$

Keterangan:

- N = Jumlah Populasi
- fa = Frekuensi yang menjawab option a
- fb = Frekuensi yang menjawab option b
- fc = Frekuensi yang menjawab option c
- fd = Frekuensi yang menjawab option d

¹⁶ Ibnu Syamsi. Ensiklopedia Umum dan Pembangunan Jilid I. FISIPOL.UGM. 1987.

Indeks tersebut adalah sebagai berikut:



Untuk mendapatkan kategori digunakan rumus interval indeks

$$I : \frac{\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}}{\text{Jumlah skor}}$$

$$I : \frac{4 - 1}{4}$$

$$I : \frac{3}{4}$$

$$I : 0,75$$

Keterangan untuk kategorinya:

1,0 – 1,75 : Kategori tidak baik

1,71 – 2,50 : Kategori kurang

2,51 – 3,25 : Kategori cukup

3,26 – 4,00 : Kategori baik